



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Makalah Utama **REVOLUSI MENTAL, KEMANDIRIAN BANGSA** **DAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL¹**

Warsono
Rektor Universitas Negeri Surabaya

Gerakan revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, telah menjadi wacana yang menarik dalam berbagai seminar. Namun sayangnya, wacana tersebut sering kali hanya berhenti pada tataran seminar, seperti wacana pembangunan karakter yang pernah dicanangkan oleh M. Nuh pada saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sering kali mudah merespon sesuatu secara cepat, tetapi kurang melakukan refleksi dan transformasi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Wacana revolusi mental, sebenarnya tersirat suatu keinginan untuk segera melakukan perubahan secara cepat dan radikal. Pertanyaannya adalah apakah kita memang harus melakukan revolusi apalagi revolusi mental? Apakah kita sudah berada dalam kondisi yang sangat gawat, sehingga dibutuhkan perubahan secara cepat dan radikal?. Bukankah ada proses perubahan lain yang lebih soft yaitu secara evolusi.

Revolusi secara politik pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu pada tahun 1945. Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, maka perlu dilakukan revolusi, karena Belanda tidak ada niatan untuk memberikan hak kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Inggris terhadap Negara-negara jajahannya. Revolusi politik tahun 1945 dilakukan untuk memperoleh hak azasi berupa kemerdekaan yang telah dirampas oleh penjajah. Hal ini ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama: “bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Dalam pernyataan tersebut secara tegas dikatakan bahwa kemerdekaan dan penjajahan adalah dua hal yang kontradiktif. Penjajahan bukan hanya telah merampas hak azasi manusia berupa kemerdekaan, tetapi juga bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sifat penjajah yang sewenang-wenang jelas bertentangan dengan perikemanusiaan, karena keduanya saling menegasikan. Setiap ada tindakan yang sewenang-wenang pasti menimbulkan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Begitu juga sifat penjajah yang serakah bertentangan dengan nilai keadilan, karena keserakahan akan merampas hak-hak orang lain, sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, kita ketahui bahwa keinginan untuk melepaskan diri dari penjajah sudah lama dilakukan. Perlawanan terhadap penjajah

¹Makalah disampaikan dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh HISPISI di Makassar pada tanggal 29 November 2015.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

telah dilakukan di berbagai daerah yang dipimpin oleh para pahlawan bangsa, seperti Hasanudin di Makasar; Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, Tengku Umar di Aceh; Imam Bonjol di Sumatera Barat; dan pahlawan lainnya. Bertahun-tahun perjuangan memperoleh kemerdekaan yang dilakukan oleh berbagai daerah tidak membawa hasil, baru pada tahun 1945 dan dalam waktu yang sangat singkat terjadi proses perubahan politik yang sangat mendasar yaitu menjadi negara yang merdeka.

Perubahan secara revolusi memang sangat cepat, tetapi juga membutuhkan persyaratan adanya seorang pemimpin yang karismatik dan kesadaran masyarakat atas realita yang dihadapi. Tugas pemimpin ini adalah menggugah kesadaran dan sekaligus mewujudkan kesadaran tersebut dalam suatu tindakan nyata. Tidak adanya kesadaran kritis dari masyarakat, menyebabkan revolusi itu tidak bisa dilakukan². Proses menggugah kesadaran ini membutuhkan waktu yang tidak cepat (tidak bisa bersifat revolusi), karena harus diawali dari pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan keyakinan. Revolusi politik Indonesia juga melalui proses seperti ini. Diawali dari kebangkitan nasional tahun 1908 yang dipelopori oleh Boedi Oetomo, kemudian dilanjutkan dengan sumpah pemuda pada tahun 1928 dan kemudian terjadi revolusi tahun 1945.

Dibutuhkan waktu selama 37 tahun dari tahun 1908–1945) untuk menggugah kesadaran bangsa Indonesia atas realitas yang dihadapi sebagai bangsa yang terjajah. Proses membangkitkan kesadaran bahwa setiap bangsa itu memiliki kesamaan harkat dan martabat dan memiliki hak azasi berupa kemerdekaan dilakukann melalui pendidikan. Kesadaran pentingnya pendidikan untuk merubah pengetahuan ini telah disadari oleh para pemuda yang terdidik seperti Wahidin Sudiro Husodo; Kiai Ahmad Dahlan; Ki Hadjar Dewantara, yang disertai tindakan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Melalui pendidikan tersebut dilakukan pencerahan terhadap setiap orang akan hak-haknya sebagai bangsa dan kesadaran atas kondisinya sebagai bangsa yang terjajah.

Namun yang tidak kalah penting dalam revolusi adalah adanya seorang pemimpin karismatik yang mampu membangkitkan semangat semua warga bangsa untuk melakukan perubahan. Pemimpin karismatik adalah pemimpin yang bisa diterima oleh semua orang sebagai suatu keharusan moral. Pemimpin karismatik adalah orang yang “dipatuhi” oleh semua (paling tidak sebagian besar) warga bangsa. Seperti revolusi yang terjadi di negara-negara lain, selalu ada pemimpin karismatik, misalnya Fidel Castro di Kuba, Che Guevara di Amerika Selatan, Mao Tse-Tung di Republik Rakyat Tiongkok, Ho Chi Minh di Vietnam, Ayatullah Khomeini di Iran, Corazon Aquino di Filipina ketika Revolusi EDSA, Pada saat revolusi politik tahun 1945 Indonesia memiliki seorang pemimpin karismatik yaitu Soekarno.

²Karl Marx telah membuktikan hal ini. Bahwa revolusi kaum buruh yang digagas Marx sebagai upaya untuk merebut modal dari kaum kapitalis tidak bisa berjalan, karena adanya kesadaran palsu dari masyarakat, bahwa masyarakat tidak merasa dieksploitasi oleh kaum kapitalis. Munculnya kesadaran palsu ini kemudian diteorikan oleh Gramsci, karena adanya hegemoni yang dilakukan oleh kaum intelektual organik yang bertindak sebagai apparatus hegemoni.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

Jika memang kita akan melaksanakan revolusi mental, maka yang dibutuhkan adalah kesadaran warga bangsa atas realita dan seorang pemimpin karismatik. Proses penyadaran terhadap kondisi bangsa yang saat ini penuh dengan korupsi dan pentingnya dilakukan revolusi mental harus dilakukan, yang salah satu caranya adalah melalui pendidikan. Proses ini jelas membutuhkan waktu lama, tidak bisa berlangsung cepat. Yang kedua adalah diperlukan seorang pemimpin karismatik yang mampu menggerakkan kesadaran tersebut menjadi suatu tindakan nyata secara serentak dan bersama-sama.

Keinginan Presiden Joko Widodo untuk melakukan revolusi mental memang bisa dimaklumi dan perlu kita dukung. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dari segi mental dan karakter, kondisi bangsa Indonesia saat ini sungguh sangat memprihatinkan. Perilaku korup sudah terjadi di hampir semua lapisan dan lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa yang melibatkan ketua DPR Setya Novanto, yang diduga melakukan tindakan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta saham dari PT Frefort sungguh sangat memalukan sebagai bangsa. Apa yang dilakukan oleh para eliti politik³ Tetapi mengindikasikan bahwa mental dan karakter sebagian besar bangsa ini perlu direvolusi.

Mental dan karakter kita yang buruk menyebabkan bangsa ini jatuh dalam kemiskinan. Secara rasional sulit untuk memberi argumentasi bagaimana Indonesia bisa menjadi Negara yang miskin. Secara teori, Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah akan lebih mudah menjadi negara maju dan kaya yang bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya. Tetapi faktanya kita justru semakin tertinggal dari Negara-negara tetangga yang notabene lebih muda usia kemerdekaannya dari kita dan tidak memiliki sumber daya alam sekaya Indonesia. Ambil contoh Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan yang jauh lebih maju dibanding dengan Indonesia. Bahkan bisa dikatakan mereka terus berjalan maju ke depan, sementara kita terus berjalan di tempat, atau bahkan malah mundur.

Dengan membandingkan negara-negara tetangga, maka diketahui bahwa yang menjadi penyebab maju mundurnya suatu bangsa bukan karena kekayaan alam, tetapi lebih banyak ditentukan oleh sumber daya manusia. Bahkan pentingnya sumber daya manusia telah menjadi teori umum yang diamini oleh para akademisi maupun oleh para praktisi. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab kemajuan suatu bangsa bukan karena usia kemerdekaan, bukan karena jumlah penduduk, dan bukan karena kekayaan sumber daya alam, melainkan lebih ditentukan oleh mental dan karakter bangsa tersebut. Karakter dan mental itu dibangun melalui suatu proses pembudayaan (pendidikan) yang terarah dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Paling tidak membutuhkan puluhan tahun.

Pentingnya mental dan karakter dalam kemajuan suatu bangsa, sebenarnya sudah disadari oleh para pendiri negara. Sejak awal para pendiri negara telah

³Perilaku seperti yang dilakukan oleh Setya Novanto, juga banyak dilakukan oleh elit politik yang lain. Banyaknya anggota DPR/DPRD dan pejabat pemerintah yang masuk penjara mengindikasikan bahwa karakter dan mental bangsa ini sudah buruk.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

meyakini dan menegaskan hal tersebut. Hal ini bisa kita perhatikan dari wacana yang muncul sejak awal membangun Negara. Coba perhatikan lirik lagu kebangsaan Indonesia raya yang digubah oleh WR Supratman, dinyatakan bahwa pembangunan jiwa lebih didahulukan daripada pembangunan raga. Bahkan dalam lagu tersebut secara jelas dan tegas dinyatakan: .. bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia raya...”. Dari syair tersebut jelas dinyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia raya (adil dan makmur) pembangunan jiwa (mental dan karakter) harus dibangun lebih dulu. Bahkan pada saat proklamasi kemerdekaan para pendiri negara juga telah menyatakan bahwa kemerdekaan hanyalah pintu gerbang untuk mencapai Indonesia yang adil makmur. Kemerdekaan saja tanpa disertai dengan pembangunan (perubahan) tidak akan mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, para pendiri negara telah mencanangkan pembangunan bangsa disertai dengan pembangunan karakter (nation and character building).

Karakter dan Mental yang harus direvolusi

Persoalan adalah apakah karakter bangsa ini begitu buruk, sehingga perlu direvolusi?. Bukankah bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, sopan santun dan suka bergotong royong. Dari sisi karakter, ada karakter yang baik, tetapi juga ada yang buruk. Karakter dan mental buruk yang mana yang harus direvolusi?. Karakter dan mental buruk bangsa Indonesia antara lain adalah sikap malas, munafik, tidak disiplin, kurang percaya diri. Pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemalas, pernah disampaikan oleh penajajah juga disampaikan oleh Syed Hussein Alatas (akademisi Malaysia yang lahir di Bogor)⁴. Sikap malas ini juga terungkap dalam pernyataan orang Jawa; “alon-alon wathon kelakon”; “biar lambat asal selamat”. Meskipun pernyataan ini juga ditafsir sebagai sikap kehati-hatian dalam melakukan sesuatu, pernyataan tersebut sudah sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan harus diganti dengan “cepat dan selamat sampai tujuan. Sekarang semua menuntut kecepatan, termasuk dalam mengambil keputusan,

Sisi lain dari karakter buruk bangsa Indonesia adalah tidak jujur. Muchtar Lubis juga pernah menyatakan bahwa bangsa kita memiliki karakter munafik (hiprocrit) yang tidak jujur kepada diri sendiri. karakter munafik ini justru semakin berkembang di masyarakat kita, terutama di kalangan elit. Lihat saja perdebatan di media masa elektronik yang terjadi akhir-akhir ini, menggambarkan bahwa kejujuran sudah menjadi barang yang sangat langka. Setiap orang berusaha untuk bohong terhadap niat yang sudah dilakukan, dengan menggunakan berbagai alasan. Padahal, setiap orang tidak akan pernah bisa bohong pada dirinya sendiri, apalagi terhadap Tuhan. Niat apapun dalam setiap tindakan yang dilakukan, pasti dirinya tahu, dan Tuhan pasti mengetahui.

Bahkan sikap tidak jujur ini juga sudah melanda di bidang pendidikan. Perilaku menyontek pada saat ujian, dan memanipulasi nilai rapot untuk masuk SNMPTN sudah terjadi di berbagai daerah. Bahkan ada kepala sekolah dan guru

⁴Mitos pribumi malas: citra orang jawa, melayu dan philipina dalam kapitalisme kolonial.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

yang ikut terlibat dalam manipulasi tersebut⁵. Ketika dunia pendidikan sudah dihindangi karakter seperti ini tentu sudah sangat memprihatinkan.

Karakter buruk lain dari masyarakat Indonesia adalah suka mengamuk sebagaimana diungkapkan oleh Umar Kayam dan Budi Dharma. Fenomena suka mengamuk ini bisa kita lihat pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh, maupun mahasiswa. Tidak jarang mereka melakukan demonstrasi dengan cara anarkhis, dengan melakukan perusakan dan pembakaran. Padahal esensi dari demonstrasi adalah menyampaikan aspirasi, bukan pemaksaan kehendak. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah bentuk pemaksaan kehendak, yang disertai dengan tindakan anarkhis.

Selain karakter, bangsa Indonesia juga memiliki mental yang buruk, seperti yang disampaikan oleh Koentjaraningrat, yaitu bermental penerabas. Implementasi dari mental penerabas antara lain, adalah perilaku korup, tidak patuh terhadap peraturan, tidak mau kerja keras, dan hanya mementingkan diri sendiri. Mental penerabas juga telah melanda kalangan elit politik. Kasus korupsi yang dilakukan oleh para elit politik yang masih sangat muda (Anas Urbaningrum, Nazarudin, Engelia Sondahk) merupakan bukti bahwa mental penerabas sampai saat ini masih ada bahkan semakin menguat. Mental penerabas ini menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi di Indonesia.

Mental penerabas ini juga telah melanda di kalangan masyarakat dan pelajar. Perilaku tidak mentaati peraturan lalu lintas di jalan, menyerobot dalam antrian (tidak mau antri) merupakan wujud dari mental penerabas. Mental penerabas ini juga menyebabkan orang tidak berdisiplin dalam kehidupan bersama. Kita bisa menyaksikan bagaimana orang berebut jalan, tanpa mengindahkan peraturan dan kepentingan orang lain.

Mental buruk lain bangsa kita adalah mental “kere” (miskin). Hal ini bisa kita lihat, setiap kali ada pembagian bantuan untuk orang miskin, orang berlomba-lomba mendaftar dan menyatakan diri sebagai orang miskin. Fenomena seperti ini juga terjadi pada saat pembagian zakat atau daging korban, orang-orang yang sebenarnya tidak miskin mengkontruk dirinya sebagai orang miskin. Mental “kere” ini merupakan perpaduan antara karakter munafik, malas dan mental penerabas. Mental “kere” ini juga menggambarkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rasa syukur yang merupakan salah satu esensi dalam beragama. Padahal, bangsa Indonesia ini adalah bangsa beriman kepada, karena wajib mempercayai adanya Tuhan, yang wujud kongkritnya adalah beragama. Mental “kere” ini menjadi sumber konflik yang sangat potensial dalam masyarakat, karena mereka akan saling berebut sesuatu.

Karakter dan mental buruk sebagaimana yang disebutkan di atas, semakin bertambah kuat dalam era global yang menawarkan kebebasan, dan kenikmatan jasmani. Globalisasi telah merubah gaya hidup masyarakat menjadi materialis, pragmatis, dan hedonis. Persinggungan antara gaya hidup yang pragmatis, hedonis, dan materialis dengan karakter dan mental yang buruk semakin menyuburkan praktek-praktek korupsi di Indonesia. Kasus Freefort yang diduga melibatkan elit

⁵Tahun 2013 terjadi kebocoran soal UN yang melibatkan beberapa guru dan kepala sekolah di kabupaten Lamongan Jawa Timur.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

politik merupakan manifestasi persinggungan karakter, mental dan gaya hidup yang pragmatis, hedonis, dan materialis⁶. Gaya hidup yang materialis, pragmatis, dan hedonis juga telah melanda generasi muda, sehingga mereka menjadi sangat konsumtif. Hal itu bisa kita saksikan di Mal-Mal. Gaya hidup yang konsumtif tanpa disertai dengan kompetensi untuk melakukan produksi, menjadi penyebab munculnya perilaku menyimpang dan tindakan kriminalitas⁷. Dengan melihat kondisi yang demikian, revolusi mental memang sudah mendesak untuk dilakukan. Jika bangsa Indonesia tidak segera melakukan revolusi mental, akan semakin tertinggal dari bangsa-bangsa lain.

Pendidikan IPS sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran kritis

Meskipun revolusi mental harus dilakukan, tetapi bukan berarti langsung bisa terjadi perubahan secara cepat dan mendasar. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa revolusi membutuhkan prasyarat adanya kesadaran kritis dari masyarakat atas realitas yang sedang dialami dan pemimpin yang karismatik. Jika dicermati sampai saat ini kedua syarat tersebut masih belum mencukupi. Saat ini belum ada pemimpin yang karismatik, yang mampu menggerakkan masyarakat untuk melakukan suatu tindakan secara cepat. Presiden Joko Widodo sebagai penggagas revolusi mental, meskipun telah memperoleh dukungan masyarakat dalam pemilihan umum secara langsung, belum dikatakan sebagai pemimpin yang karismatik⁸. Presiden Joko Widodo tidak sekarismatik Bung Karno, atau melaah bisa dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo bukan pemimpin yang karismatik, tetapi pemimpin yang lahir dari proses politik yang demokratis, karena memenangkan pemilu.

Di sisi lain, kesadaran kritis masyarakat mengenai perlunya revolusi mental juga belum muncul. Bahkan sebagian besar masyarakat masih belum paham tentang apa yang dimaksud dengan revolusi mental. Hal ini terbukti dengan banyaknya seminar yang berthemakan revolusi mental seperti saat ini. Visi tentang revolusi mental belum terjabarkan secara lebih jelas dan operasional, sehingga masih banyak tafssir dan model untuk mewujudkannya.

Gagasan tentang revolusi mental, juga belum memperoleh dukungan kuat dari para elit politik. Hal ini bisa dilihat dari munculnya upaya pelemahan terhadap KPK oleh para elit politik di DPR. Adanya konflik antara KPK dengan

⁶ Coba simak dialog telpon yang diduga perbicarakan antara Setya Novanto dengan direktur PT Freefort, muncul kata-kata, happy, beli pesawat jet pribadi. Coba bandingkan dengan gaya hidup para pemimpin awal kemerdekaan, seperti Hatta, Agus Salim, Syahrir dan lainnya, yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan bangsa dan Negara. Mereka tidak berpikir untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

⁷Banyaknya kasus narkoba dan prostitusi di kalangan remaja termasuk para elit politik, merupakan dampak dari gaya hidup yang konsumtif. Berbagai kasus yang menimpa pada anggota DPRD kabupaten Pasuruan merupakan akibat dari buruknya karakter dan mental, serta gaya hidup yang hedonis.

⁸Menurut Jay Conger dan Rabindra Kanungo, pemimpin karismatik memiliki cirri antara lain, memiliki visi yang kuat, mampu untuk mengartikulasikan visi, percaya diri untuk melaksanakan visi, peka terhadap lingkungan dan mampu menjadi agen perubahan. (<http://www.wattpad.com/4179836> Konsep-dasar Kepemimpinan diunduh tgl 24 November 2015.



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

lembaga penegak hukum lain juga mengindikasikan adanya upaya pelemahan terhadap KPK. Padahal, di mata masyarakat, KPK menjadi simbol pemberantasan korupsi dan korupsi merupakan mental yang harus direvolusi. Berbagai upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh para elit politik di DPR dan konflik dengan penegak hukum lainnya mengindikasikan bahwa revolusi mental yang digagas oleh Presiden Joko Widodo masih belum mendapat dukungan dari para elit politik.

Lemahnya dukungan para elit politik dalam pemberantasan korupsi mengindikasikan bahwa revolusi mental masih perlu disosialisasikan dan diartikulasikan lebih operasional, agar mendapat dukungan luas dari para elit politik maupun masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang perlu dan apa yang akan dicapai dengan revolusi mental masih harus ditumbuhkan. Guna menumbuhkan kesadaran diperlukan suatu proses kejiwaan yaitu melalui pengetahuan, pemahaman, penghayatan, dan keyakinan. Proses kejiwaan tersebut harus dilakukan melalui pendidikan. Oleh karena itu, salah satu peran pendidikan IPS adalah membangun dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat akan perlunya revolusi mental.

Pendidikan IPS yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berikir kritis dan sekaligus menumbuhkan kesadaran hidup bersama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pendidikan IPS sebenarnya bukan hanya sebatas pada mata pelajaran IPS di sekolah, tetapi juga semua pendidikan yang menjadikan manusia sebagai obyek kajiannya. Oleh karena itu, pada tataran sekolah menengah atas (SMA), matapelajaran sosiologi, antropologi, ekonomi, dan geografi sebenarnya juga termasuk pendidikan IPS yang salah satu tujuannya adalah untuk membangun kesadaran hidup bersama dan cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ada beberapa pendapat tentang tujuan pendidikan IPS. Gross menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah “*to prepare students to be well functioning citizens in a democratic society*”. Tujuan lain dari pendidikan IPS adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik menggunakan penalaran dalam mengambil keputusan setiap persoalan yang dihadapinya. Sedangkan Kosasih menyebutkan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga akan menjadikannya semakin mengerti dan memahami lingkungan sosial masyarakatnya.

Pendidikan IPS tentu bukan semata-mata hanya penanaman pengetahuan tetapi lebih diarahkan kepada pengembangan pola pikir yang kritis dan menumbuhkan kesadaran hidup bersama, yang pada gilirannya akan cerdas dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan IPS bukan hanya memberikan konsep dan teori, tetapi harus lebih ditekankan pada problem solving terhadap berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan Negara, tentu masalahnya disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Pada anak SD diarahkan pada persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekitar, yang kongkrit dan sederhana, sehingga dari awal anak sudah tumbuh kesadaran bahwa dia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan setiap orang membutuhkan kehadiran orang lain, yang secara bersama-sama membangun



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

masyarakat dan bangsa, serta Negara. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ada suatu nilai dan system hukum yang harus ditaati dan dijunjung bersama. Dengan kesadaran dan kecerdasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mereka bisa mengambil peran dalam pembangunan bangsa untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur.

Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pendidikan IPS harus berorientasi ke masa depan, bukan ke masa kini apalagi ke masa lampau. Masa kini dan masa lampau bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk membuat prediksi dan rencana di masa depan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muchtar Buchori, bahwa pendidikan yang ideal adalah yang bersifat antisipatoris dan preparatoris, yakni mengacu ke masa depan, dan dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab bagi kehidupan masa depan yang lebih baik, bermutu dan bermakna.

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah membawa dampak pada perubahan sosio cultural masyarakat. Masyarakat semakin mengedepankan rasionalitas daripada pengalaman empiris masa lampau. Dalam menghadapi masa depan, perubahan paradigma berpikir ini menjadi sangat penting, karena pemikiran itu yang akan membimbing sikap dan perilaku. Oleh karena itu, guru IPS harus bisa membawa peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), bahkan sampai pada pemikiran yang reflektif, dengan pendekatan secara deduktif maupun induktif.

Dalam pendidikan IPS, Guru tidak boleh terjebak kepada ekspositori, yang hanya mendeskripsikan sesuatu, tetapi harus melakukan kajian secara kritis, reflektif, bahkan abstraksi. Pendidikan IPS juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif peserta didik, sebagaimana dikatakan Ross, 2006:21 bahwa *social studies is used for three primary purposes: (1) socialization into society's norms; (2) transmission of facts, concepts, and generalizations from the academic disciplines; and (3) the promotion of critical or reflective thinking*. Kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan abstraksi harus dilatihkan kepada peserta didik, agar mereka bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dan mempersiapkan diri untuk menghadapi. Tema seperti perubahan, science dan teknologi, serta globalisasi merupakan tema yang bisa dijadikan bahan kajian untuk membangun kemampuan berpikir prediktif dan kesadaran terhadap realitas yang sedang dihadapi. Kemampuan berpikir kritis dan kesadaran atas realitas yang sedang dihadapi ini, yang bisa menjadi modal untuk melakukan suatu perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. 2014 *The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism*. London: Routledge
- Buchori, M. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Dewa Nyoman Wija Astawa; I Ketut Ardana; dan I Wayan Gata. 2014. *Pengembangan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Pendidikan IPS*



SEMINAR NASIONAL

“Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Hotel Singgasana, Makassar, 28-29 Nopember 2015

dalam Konstruksi Kurikulum Sekolah Dasar. Suluh Pendidikan Nomor 1 Volume 12 edisi Juni 2014.

Koentjaraningrat, 1996. *Kemudahan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

National Standards For Social Studies Teachers. *National Standards for Social Studies Teachers • Volume I* Copyright © 2002 National Council for the Social Studies. Printed in the United States of America.

National Curriculum Standars for Soccial Studies: executive summary.
<http://www.socialstudies.org>.

Moedjanto, [http/Temp/digital_blob_F15911_Social Sciences.htm](http://Temp/digital_blob_F15911_Social_Sciences.htm)

Ross, E. Wayne. 2006. *The Social Studies Curriculum Purposes, Problems, and Possibilities*. Albany: State University of New York Press.

Warsono, 2014. *Pancasila-isme dalam Dinamika Pendidikan*. Surabaya: Unesa University Press.

<http://awaliyahhasanah.blogspot.co.id/2013/06/definisi-pendidikan-ips-dan-pendidikan.html>, diunduh tanggal 25 November 2015.